



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1327-1341

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Determinan Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Tristia Izzatunnisa Azzahra Insan Putri^{1✉}, I Nyoman Mahaendra Yasa²

Universitas Udayana

Email: tristiaazzhr22@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Provinsi Bali. Data sekunder dikumpulkan melalui metode observasi non-perilaku dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat hunian hotel dan investasi swasta memiliki dampak positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Bali, sementara dana perimbangan tidak menunjukkan pengaruh terhadap derajat tersebut. Tingkat hunian hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan investasi swasta dan derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh. Sebaliknya, dana perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Tingkat hunian hotel, investasi swasta, dan dana perimbangan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui derajat desentralisasi fiskal di daerah Provinsi Bali. Untuk mengatasi disparitas pembangunan, pemerintah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor tertentu guna mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan.

Kata Kunci: *Dana Perimbangan; Derajat Desentralisasi Fiskal; Investasi Swasta; Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat Hunian Hotel;*

Abstract

This study aims to identify the factors that affect the degree of fiscal decentralization and economic growth in various regions in Bali Province. Secondary data were collected through non-behavioral observation methods and in-depth interviews, then analyzed using path analysis. The results of the study revealed that the occupancy rate of hotels and private investment had a positive and significant impact on the degree of fiscal decentralization in the districts/cities of Bali Province, while the balance fund did not show any influence on this degree. Hotel occupancy rates have a positive and significant influence on economic growth in districts/cities in Bali Province, while private investment and the degree of fiscal decentralization have no effect. On the other hand, the balance fund does not have a positive and significant effect on economic growth in Bali Province. Hotel occupancy rates, private investment, and balance funds do not affect economic growth indirectly through the degree of fiscal decentralization in the Bali Province area. To overcome development disparities, the government needs to increase Regional Original Revenue (PAD) in each district/city by focusing on the development of certain sectors to reduce dependence on balance funds.

Keywords: *Central Government Resources Incomealancing Fund; Degree Of Fiscal Decentralization;Economic Growth;Hotel Occupancy Rate;Investment;*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan struktural yang terjadi secara berkelanjutan, di mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita melalui aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan pertumbuhan ekonomi maka pembangunan ekonomi dapat berjalan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan pada kondisi perekonomian suatu daerah yang terjadi secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan kemajuan atau pembangunan ekonomi sebuah negara (Murni, 2016:10).

Secara nasional pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami kenaikan jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020 yang sebesar -9,34 persen dan tahun 2021 sebesar -2,46 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota pada tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (%)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jembrana	5,59	5,56	-4,98	-0,65	2,98	3,66
2.	Tabanan	5,71	5,58	-6,17	-1,98	2,94	3,56
3.	Badung	6,73	5,81	-16,55	-6,74	9,97	11,29
4.	Gianyar	6,01	5,62	-8,39	-1,05	4,04	5,06
5.	Klungkung	5,48	5,42	-6,38	-0,23	3,12	4,70
6.	Bangli	5,48	5,45	-4,10	-0,33	2,79	3,50
7.	Karangasem	5,44	5,50	-4,49	-0,56	2,58	3,10
8.	Buleleng	5,60	5,51	-5,80	-1,27	3,11	3,64
9.	Denpasar	6,42	5,82	-9,44	-0,92	5,06	5,64
Provinsi Bali		6,31	5,60	-9,31	-2,46	4,84	5,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa daerah di Provinsi Bali mengalami fluktuatif. Tahun 2018-2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mengalami penurunan yang puncaknya pada tahun 2020 yang dikarenakan aktivitas ekonomi Provinsi Bali terhambat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Tahun 2021-2023 perekonomian Provinsi Bali kembali yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika diperhatikan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang memiliki nilai persentase di atas Provinsi Bali, sementara pada kabupaten/kota lain masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bali. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tidak diikuti dengan pemerataan pada kabupaten/kota lain dapat menyebabkan adanya daerah yang relatif tertinggal dan ada daerah yang relatif maju yang diakibatkan oleh ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas kaitannya dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan melalui efisiensi sumber daya. Tujuan diadakannya desentralisasi fiskal adalah untuk memberdayakan daerah untuk mengatur pembangunan di daerah tersebut. Derajat desentralisasi fiskal mengacu pada tingkat kemandirian keuangan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan di suatu daerah. rasio kemandirian fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan, sehingga ketergantungan akan pemerintah pusat diharapkan akan berkurang (Marlina, 2014).

Apabila semakin tinggi persentase nilai pada derajat desentralisasi fiskal maka tingkat kemandirian daerah dinilai sangat baik sehingga semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, demikian sebaliknya semakin rendah persentase nilai tersebut maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (%)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jembrana	11,54	11,68	13,59	14,70	15,35	17,44
2	Tabanan	19,52	18,60	17,79	18,44	23,72	23,22
3	Badung	83,56	85,50	55,18	68,59	82,45	86,99
4	Gianyar	39,50	44,27	29,92	26,41	37,02	55,85
5	Klungkung	17,01	17,97	20,02	22,10	23,68	22,58
6	Bangli	10,85	10,64	9,28	10,09	12,04	16,47
7	Karangasem	13,51	14,35	14,80	15,21	18,53	20,74
8	Buleleng	16,62	16,27	15,91	17,83	25,33	20,92
9	Denpasar	44,63	47,39	37,23	39,55	41,87	45,54
Provinsi Bali		59,30	60,55	56,34	51,93	65,64	55,04

Sumber: BI Provinsi Bali, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuatif. Namun rata-rata derajat desentralisasi fiskal Provinsi Bali memiliki nilai yang sangat baik. Hal ini terlihat bahwa nilai tersebut diatas angka 50 persen pada periode 2018-2023. Pada tabel tersebut terlihat bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Badung memiliki nilai derajat desentralisasi fiskal paling tinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Dari Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki nilai kemandirian fiskal diatas rata-rata Provinsi Bali, sementara pada kabupaten/kota lain memiliki nilai kemandirian fiskal dibawah rata-rata Provinsi Bali.

Dalam keberhasilan pembangunan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian fiskal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor secara tidak langsung, salah satu faktor tersebut yaitu dengan tingkat hunian hotel. Pada perekonomian di Provinsi Bali, sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang mempengaruhi sebagian besar pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pada perekonomian di Provinsi Bali, sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang mempengaruhi sebagian besar pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Semakin banyaknya objek pariwisata pada suatu daerah maka semakin menuntut keseriusan pengelola hotel untuk menyediakan fasilitas dan juga akomodasi kepada para tamu untuk merasa betah dan nyaman.

Selain itu faktor lain dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan kinerja kemandirian fiskal yaitu dengan adanya investasi. Dimana Investasi turut berperan dalam membangun perekonomian di suatu kabupaten/kota. Di Provinsi Bali peran investasi sangat mempengaruhi bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata sangat membutuhkan peran dari investasi melalui penanaman modal baik dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA). Investasi pada kemandirian fiskal merujuk pada alokasi dana pemerintah daerah untuk mendukung sektor-sektor penting dalam daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemandirian fiskal dapat mempengaruhi investasi pemerintah daerah, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah (Taufick, 2016).

Selain investasi, dana perimbangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian fiskal. Dana perimbangan merupakan contoh nyata dari desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah. Dana ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting, membantu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan pemerintah daerah bergantung pada dana ini. Hal ini sejalan dengan tujuan dana perimbangan, yaitu untuk mempromosikan pembangunan yang merata di Provinsi Bali. Dengan berkontribusi pada belanja pembangunan, dana ini dapat menarik investor ke daerah tersebut, sehingga memperluas basis kegiatan ekonomi (Dewi & Wardana, 2022).

Dengan menggunakan tingkat hunian hotel, investasi swasta dan dana perimbangan sebagai variabel intervening dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan atau disparitas pertumbuhan ekonomi serta tidak meratanya derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga pembangunan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Bali menjadi tidak merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Adapun sifat dari penelitian ini yakni penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yang dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, terpilihnya Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan pada pertumbuhan ekonomi pada beberapa daerah di Provinsi Bali yang tidak merata. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dari beberapa kabupaten/kota mengalami ketertinggalan dan beberapa kabupaten/kota lain mengalami kemajuan. Ditambah lagi derajat desentralisasi fiskal pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali juga tidak merata. Pada objek penelitian ini adalah memfokuskan pada tingkat hunian hotel, investasi, dana perimbangan, derajat desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2022. Dalam penelitian ini jumlah data *cross section* sebanyak 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dan data *time series* sebanyak 12 tahun yang dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 2022 dan tidak melibatkan tahun 2020 sampai 2021. Hal ini dikarenakan tahun tersebut perekonomian Provinsi Bali yang menurun drastis yang berdampak pada sektor-sektor lain yang menyebabkan data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebesar $9 \times 12 = 108$. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbentuk kuantitatif. Data sekunder yang diperoleh untuk penelitian ini yakni Direktorat Jenderal Keuangan, Badan Pusat

Statistik (BPS) Provinsi Bali, publikasi, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pokok penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi non-perilaku dan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Untuk analisis data, penelitian ini memanfaatkan statistik deskriptif dan analisis jalur, dengan analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak E-views 12. Adapun persamaan struktur sebagai berikut.

Struktur 1

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Struktur 2

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Y_1 = Derajat Desentralisasi Fiskal

Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi

X_1 = Tingkat Hunian Hotel

X_2 = Investasi

X_3 = Dana Perimbangan

$\beta_1 \dots \beta_7$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

e_1, e_2 = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini adalah memberikan analisis perhitungan nilai maksimum dan minimum, rata-rata dan standar deviasi yang berhubungan dengan penelitian derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, tingkat hunian hotel, investasi swasta, serta dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun analisis pada penelitian ini didasarkan pada 14 tahun periode penelitian yang dimulai dari tahun 2009-2022, namun untuk tahun 2020-2021 tidak dimasukkan karena adanya pandemi *Covid-19* yang sempat menghambat perekonomian Provinsi Bali. Hasil statistik deskriptif tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Tingkat Hunian Hotel (X1)	Investasi Swasta (X2)	Dana Perimbangan (X3)	DDF (Y1)	Pertumbuhan Ekonomi (Y2)
Satuan	Persen	Juta rupiah	Rupiah	Persen	Persen
Mean	30.424	148,244	704,506	25.022	5.832
Maximum	62.887	15,728,798	1,645,523	84.47	9.97
Minimum	1.489	1,365	280,705	3.47	2.58
Std. Dev	16.793	2,425,422	273,725	21.502	0.999

Sumber: BI Provinsi Bali, 2023

Menurut hasil penelitian, hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yang diwakili oleh koefisien jalur, dapat diidentifikasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur

untuk pengujian data. Untuk menyusun persamaan struktural, data yang dikumpulkan diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak E-views 12, menghasilkan hasil yang disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Hasil *Path Analysis* (Struktur 1)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.1186	4.6543	-0.0254	0.9797
Tingkat Hunian Hotel	0.7235	0.0873	8.2848	0.0000
Investasi Swasta	3.0592	6.0324	5.0714	0.0000
Dana Perimbangan	-1.9992	5.0052	-0.3994	0.6904

a. Dependet Variabel: Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program E-views 12 tingkat hunian memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 0,724 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ mengidentifikasi bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi swasta dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 3,059 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ mengidentifikasi bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali dan dana perimbangan memiliki nilai standardized coefficient beta sebesar -1,999 dan nilai probabilitas sebesar $0,690 > 0,05$ mengidentifikasi bahwa H_0 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa dana perimbangan berpengaruh tidak positif dan tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 5. Hasil *Path Analysis* (Struktur 2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.8424	0.2777	21.0333	4.5613
Tingkat Hunian Hotel	0.0206	0.0067	3.0669	0.0027
Investasi Swasta	4.9603	4.0207	1.2337	0.2201
Dana Perimbangan	-1.1098	2.9893	-3.7129	0.0003
DDF	0.0029	0.0059	0.489	0.6258

a. Dependet Variabel: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program E-views 12 tingkat hunian memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 0,021 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ mengidentifikasi bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi swasta dengan nilai standardized coefficient beta sebesar 4,960 dan nilai probabilitas sebesar $0,220 > 0,05$

mengidentifikasi bahwa H_0 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sementara itu, dana perimbangan memiliki nilai standardized coefficient beta sebesar -1,109 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ mengidentifikasi bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa dana perimbangan berpengaruh tidak positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada derajat desentralisasi fiskal memperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 0,002 dan nilai probabilitas sebesar $0,625 > 0,05$ mengidentifikasi bahwa H_0 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

$$\text{Persamaan Struktur 1} \quad : \hat{Y}_1 = 0,724 X_1 + 3,059 X_2 - 1,999 X_3 + e_1$$

$$\text{Persamaan Struktur 2} \quad : \hat{Y}_2 = 0,021 X_1 + 4,960 X_2 - 1,109 X_3 + 0,002 Y_1 + e_2$$

Keterangan:

Y_1 = Derajat Desentralisasi Fiskal

Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi

X_1 = Tingkat Hunian Hotel

X_2 = Investasi

X_3 = Dana Perimbangan

Berdasarkan hasil pengaruh langsung pada Tabel 4 dan Tabel 5 koefisien jalur hubungan antar variabel tingkat hunian hotel, investasi swasta, dana perimbangan, derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan dapat diringkas pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Ringkasan Koefisien Jalur

Hubungan Antar Variabel	Koefisien	P-value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,723	0,000	Positif dan Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	3,06	0,000	Positif dan Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_1$	-2,00	0,69	Tidak Positif dan Tidak Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,021	0,002	Positif dan Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	4,96	0,22	Positif dan Tidak Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_2$	-1,11	0,000	Tidak Positif dan Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,002	0,623	Positif dan Tidak Signifikan

Keterangan:

Y_1 = Derajat Desentralisasi Fiskal

X_1 = Tingkat Hunian Hotel

X_2 = Investasi

X_3 = Dana Perimbangan

Berdasarkan model struktur 1 dan struktur 2, maka untuk menghitung nilai standar error sebagai berikut.

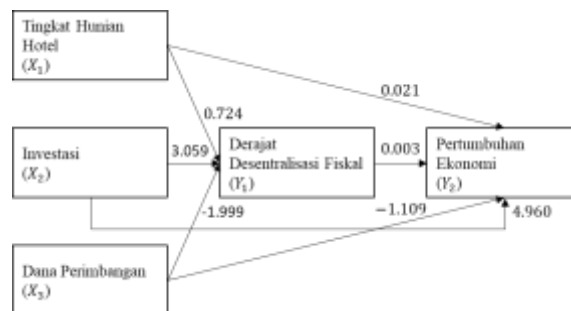
$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2} = \sqrt{1 - 0,568} = 0,657$$

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2} = \sqrt{1 - 0,288} = 0,844$$

Berdasarkan nilai e_1 dan e_2 yang telah diketahui, selanjutnya dapat dihitung koefisien determinasi total sebagai berikut.

$$R_m^2 = 1 - (0,657^2)(0,844^2) = 0,693$$

Dari perhitungan nilai determinasi total diketahui sebesar 69,3 persen yang mempunyai arti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel tingkat hunian hotel, investasi swasta, dana perimbangan serta derajat desentralisasi fiskal, sedangkan sisanya sebesar 30,7 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.



Gambar 1. Hasil Analisis Jalur Determinan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil pengujian, maka diperoleh nilai pengaruh langsung, tidak langsung, dan total antar variabel sebagai berikut.

Tabel 7. Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Penelitian

Hubungan Antar Variabel	Langsung	Tidak Langsung	Total
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,723	-	0,723
$X_2 \rightarrow Y_1$	3,06	-	3,06
$X_3 \rightarrow Y_1$	-2,00	-	-2,00
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,021	(0,723 x 0,003)	0,0014
$X_2 \rightarrow Y_2$	4,96	(3,06 x 0,003)	0,006
$X_3 \rightarrow Y_2$	-1,11	((-2,00) x 0,003)	-0,004
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,002	-	0,002

Tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Yang diartikan bahwa apabila tingkat hunian hotel semakin meningkat maka derajat desentralisasi fiskal suatu daerah juga akan meningkat. Provinsi Bali memiliki sektor pariwisata sebagai pilar perekonomian. Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian pada kabupaten/kota Provinsi Bali dengan industri perhotelan memainkan peran yang sangat penting. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Sabatini & Purwanti (2013) mengenai pengaruh tingkat hunian dapat bersifat positif

terhadap kemandirian fiskal di Kota Semarang, terutama melalui peningkatan penerimaan pajak hotel.

Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bali. Maka hal ini dapat diartikan bahwa apabila investasi swasta semakin meningkat maka derajat desentralisasi fiskal juga ikut meningkat. Investasi memainkan peran penting dalam desentralisasi fiskal daerah. Selain itu, investasi juga merupakan kunci dalam mendukung desentralisasi fiskal daerah dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan, meningkatkan kapasitas daerah, serta mendorong perubahan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilla, *et.al* (2022) menyebutkan bahwa investasi berperan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

Selanjutnya pada variabel dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Yang diartikan bahwa jika dana perimbangan semakin meningkat maka derajat desentralisasi fiskal akan menurun. Pada hasil estimasi penelitian ini memang berpengaruh negatif, namun pengaruh dana perimbangan terhadap derajat desentralisasi fiskal tidak signifikan. Dengan kata lain, setiap peningkatan dana perimbangan tidak berpengaruh kuat terhadap penurunan derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2019) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan untuk kabupaten/kota di kluster 1,3, dan 4.

Selanjutnya pada variabel tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang diartikan bahwa jika tingkat hunian hotel semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Di Provinsi Bali, perekonomian sebagian besar bertumpu pada sektor pariwisata. Dengan banyaknya wisatawan yang berlama-lama tinggal akan memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel, karena semakin banyak wisatawan yang menginap maka penjualan kamar juga akan meningkat. Pendapatan yang diterima oleh hotel maka akan disetorkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pajak yang dicatat sebagai tanda telah membayar kewajiban pengelola hotel. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian Windayani & Budhi (2016), menyebutkan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi investasi swasta, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonominya. Meskipun memiliki pengaruh positif, ketidaksignifikan menunjukkan bahwa variabel investasi swasta belum memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal ini dapat terjadi apabila birokrasi dan regulasi yang rumit. Proses perizinan yang rumit akan memakan waktu yang menghambat masuknya investasi baru dan memperlambat realisasi proyek investasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tandiawan *et. al.*, (2015) yang menyebutkan bahwa investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Dana perimbangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa ketika dana perimbangan meningkat, pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Sebaliknya, penurunan dana perimbangan cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan temuan Wiraswasta *et al.* (2018), yang menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Selain itu, pendanaan untuk otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui investasi modal, juga didukung oleh dana perimbangan.

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan efek positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa meskipun peningkatan desentralisasi fiskal terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, efeknya relatif lemah. Ketidaksignifikan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum memberikan dampak yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian oleh Yudistira & Jember (2015), yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa desentralisasi fiskal juga berperan dalam menentukan tingkat investasi di berbagai daerah.

Derajat desentralisasi fiskal tidak berfungsi sebagai variabel perantara antara tingkat hunian hotel dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel tidak secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rasa & Yasa (2020), yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel memengaruhi pendapatan yang diterima oleh hotel dan memberikan dampak positif

pada ekonomi Provinsi Bali, tetapi tidak melalui derajat desentralisasi fiskal sebagai variabel perantara.

Derajat desentralisasi fiskal tidak berfungsi sebagai variabel perantara antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa investasi swasta tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kresnanda (2016), yang menyatakan bahwa investasi swasta tidak berhasil memperkuat dampak positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidakmampuan investasi swasta untuk memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi nilai realisasi investasi dan ketidakmerataan investasi swasta, yang hanya terpusat di daerah-daerah dengan objek wisata unggulan seperti Kawasan Sarbagita.

Derajat desentralisasi fiskal tidak berfungsi sebagai variabel perantara antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Kusuma (2016), yang mengindikasikan bahwa dana perimbangan memiliki dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui derajat desentralisasi fiskal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, implikasi dari studi ini adalah untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal dengan memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan tingkat hunian hotel serta mendorong pemerintah Provinsi Bali untuk memperbaiki sektor pariwisata. Dengan demikian, kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat menciptakan pasar investasi yang dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur, serta meningkatkan ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah dapat menerapkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan transfer dana perimbangan, maka tujuan otonomi daerah dapat tercapai dan pada akhirnya, ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian hotel dan investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Bali. Tingkat hunian hotel memberikan dampak positif dan signifikan, sementara investasi swasta dan derajat desentralisasi fiskal memiliki tidak berpengaruh, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Kemudian tingkat hunian hotel, investasi swasta, dan dana perimbangan tidak secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata melalui tingkat hunian hotel, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan memastikan bahwa sumber pendapatan tersebut bersifat berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah hotel sehingga tingkat hunian dapat meningkat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengevaluasi dan memperbaiki strategi pemasaran untuk hotel-hotel yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pertumbuhan investasi swasta di kabupaten/kota Provinsi Bali sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dalam desentralisasi fiskal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat bekerja sama dalam merancang regulasi yang jelas dan terstruktur untuk melindungi investasi di wilayah ini. Diharapkan juga agar investor tidak hanya fokus pada kota-kota besar, tetapi juga melirik daerah-daerah yang masih berkembang. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, pembangunan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Investasi memiliki efek multiplier yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat ekonomi.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan ketidakmerataan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Bali, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, pemerintah daerah harus menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan pada transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). Tingkat Penghunian Kamar Akomodasi Provinsi Bali 2020. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2021). Tingkat Penghunian Kamar Akomodasi Provinsi Bali 2021. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2022). Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2022). Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2020-2021. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2022). Tingkat Penghunian Kamar Akomodasi Provinsi Bali 2022. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan III-2023. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2023). Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia Provinsi Bali. (2019). Laporan Perekonomian Provinsi Bali 2019. Denpasar: Bank Indonesia.
- _____. (2020). Laporan Perekonomian Provinsi Bali 2020. Denpasar: Bank Indonesia.
- _____. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Bali 2021. Denpasar: Bank Indonesia.
- _____. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Bali 2022. Denpasar: Bank Indonesia.
- Fadilla, Salsa Intan., Haris Kencana TJ., & Diah Retnowati. (2022). Desentralisasi Fiskal Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Jendral Sudirman*, 1(2), hal 917-930.
- Ginting, Ari Mulianta., Muhammad Zilal Hamzah., & Solfida Eleonora. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), hal. 105-127.
- Kresnanda, Anak Agung Ngurah Agung. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(2), hal 44-63.
- Marlina. (2014). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Aceh. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), hal 52-58.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. Bandung: Rafika Aditama.

- Sabatini, Rifqy., & Evi Yulia Purwanti. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang. *Journal of Economics*, 1(1), hal 1-7.
- Saputra, B., & Mahmudi, M. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2), hal. 185-199.
- Tandiawan, E., Naukoko, A., & Wauran, P. (2015). pengaruh investasi swasta dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kesempatan kerja di kota manado tahun 2001-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01), hal 180-196.
- Windayani, Ida Ayu Ratih Sasmitha., & Made Kembar Sri Budhi. (2016). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), hal 115-285.
- Wiraswasta, Fani., M Pudjihardjo., & Putu Mahardika Adis. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), hal 170-180.
- Yudistira, I. B., & Jember, I. M. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Junal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(2), hal.121-128.